

## **ABSTRACT**

### **THE SOCIETY'S PERCEPTION ABOUT THE REVOLUTION OF ECONOMIC ASPECT AND DEFENSE AND SECURITY ASPECT BETWEEN THE AUTHORITIES OF ORDE BARU AND REFORMASI**

**By**

**(Stephanus Hendri, Adelina Hasyim, M. Mona Adha)**

This research used descriptive qualitative method with 21 respondents. It used questionnaire as the main technique and the documentation and interview as supporting techniques.

The result of the research of the society's perception about the economic aspect in the Orde Baru authority is in positive category (57.14%), the economic aspect in the Reformasi authority is in moderate category (61.90%), defense and security aspect in Orde Baru authority is in positive category (71.43%), and security aspect in Reformasi authority is in moderate category (52.38%). Based on the result of the research, the patriarches in Dusun IV Tias Bangun Pubian subdistrict Central Lampung in year 2013 have positive perception towards the economic and defense and security happened in Orde Baru authority.

**Keywords:** economic aspect, defense and security, orde baru, reformasi

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERUBAHAN ASPEK EKONOMI DAN HANKAM ANTARA PEMERINTAHAN ORDE BARU DENGAN REFORMASI**

**Oleh**

**(Stephanus Hendri, Adelina Hasyim, M. Mona Adha)**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel 21 responden. Dan menggunakan teknik pokok angket dan teknik penunjang dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Orde Baru berada pada kategori positif (57,14%), aspek ekonomi pada pemerintahan Reformasi berada pada kategori sedang (61,90%), aspek hankam pada pemerintahan Orde Baru berada pada kategori positif (71,43%), dan aspek hankam pada pemerintahan Reformasi berada pada kategori sedang (52,38%). Berdasarkan hasil penelitian, kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013, kesimpulannya memiliki pandangan positif terhadap kehidupan dibidang ekonomi dan hankam yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

**Kata kunci:** aspek ekonomi, hankam, orde baru, reformasi

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Rezim Orde Baru merupakan pemerintahan yang berintikan ABRI dan kaum Teknokrat dengan kepemimpinan Jendral Soeharto yang mengambil langkah-langkah pasti untuk menata kembali kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam yang pada waktu itu porak poranda. Arah penataan kembali itu terkandung dalam tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan dalil melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Soeharto memanipulasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan absolutisme kekuasaan eksekutif. Pada pasal 1 (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR”. Kalimat di dalam pasal 1 (2) tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh Soeharto dan rezim Orde Barunya untuk menyatakan bahwa segala perasaan dan pikiran rakyat harus disalurkan lewat MPR dan rakyat tidak memiliki hak untuk menyampaikan pikiran-pikirannya lagi, selain pikiran-pikiran yang berkembang di MPR. Oleh sebab itu demonstrasi dilarang, selalu dilarang dan dibubarkan dengan cara kekerasan dan penangkapan oleh polisi atau militer.

Kesempatan berikutnya diberikan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui pasal 2 (1) dan pasal 5 (1). Dalam pasal 2 (1) menyatakan bahwa “MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh UU”. Dan dipasal 5 (1) disebutkan bahwa, “Presiden memegang kekuasaan membuat UU dengan persetujuan DPR”. Disini kekuasaan DPR hanya sebatas memberi persetujuan Undang-Undang yang telah dibuat oleh presiden. Oleh sebab itu mudah bagi presiden untuk membuat Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR sesuai dengan selera presiden. Sehingga banyak wakil-wakil rakyat (MPR) ditambah dan diganti dengan wajah baru dimana fraksi Golkar adalah yang terbesar, ABRI diwakili di DPR, utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR serta diadakannya penyederhanaan kepartaian menjadi dua parpol dan satu golongan, yaitu Golkar, yang merupakan organisasi peserta pemilu. Dimana pikiran-pikiran itu melahirkan konsensus nasional sistem Orde Baru, dimana intinya mau menempatkan kedudukan presiden di atas DPR/MPR. Dengan menundukkan DPR/MPR, sistem presidensil benar-benar ditegakkan. Bahkan dengan memanipulasi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soeharto berhasil pula menempatkan dirinya menjadi mandataris MPR. Sebagai presiden dan mandataris MPR, Soeharto mendapat mandat atau kewenangan, selain menundukkan MPR, juga untuk menggantikan segala tugas dan fungsi MPR.

Formulasi politik itu merupakan bagian dari konsensus nasional diantara parpol yang ada, lalu dituangkan ke dalam paket Undang-Undang politik 1969, khususnya Undang-Undang parpol, Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD. Dalam praktek Orde Baru, semua nama yang ada di dalam daftar calon anggota DPR dan MPR ada ditangan presiden. Sebelum itu para calon dilitsus (penelitian khusus) sebelum disahkan menjadi calon sementara dan calon tetap. Tim litsus terdiri dari orang-orang

ABRI, khususnya dari kelompok intelijen dan yang lebih khusus lagi mereka tergabung dalam Bakorstranas (Badan Koordinasi Strategi Nasional) dibentuk dengan alasan untuk menyaring mereka dalam penyusupan oknum-oknum G-30-S/PKI 1965 dan untuk menilai loyalitas mereka kepada Orde Baru, khususnya kepada Pancasila sebagai dasar. Tetapi lebih dari pada itu, litsus ditunjukkan untuk melihat loyalitas mereka terhadap pemerintah dan Soeharto. Lembaga litsus selain bekerja menentukan calon wakil rakyat, juga bekerja menentukan calon PNS. Sedang bakorstranas yang dibentuk dari pusat hingga daerah-daerah tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Selain itu juga berlaku sistem *recall*. Para anggota DPR/MPR yang tidak royal dengan pemerintah bisa direcall oleh fraksi atau partainya masing-masing.

Masalah Hankam pada masa Orde Baru tidak perlu diragukan lagi, hal ini tidak lain karena pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang berintikan ABRI. Hankam pada masa Orde Baru cukup tegas, namun tidak terlalu peduli dengan HAM, berbeda dengan masa Reformasi saat ini, masalah HAM justru yang digembor-gemborkan, tapi malah semakin memberikan kesempatan bagi orang jahat untuk memanfaatkan kondisi ini, dia merasa memiliki HAM yang patut dipertahankan namun tidak memikirkan HAM orang lain, karena lupa akan kewajibannya sebagai manusia.

Masa Orde Baru untuk masalah perekonomian merupakan tujuan yang paling utama, sesuai dengan yang dikatakan oleh I Wayan Badrika (2006:141), "Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, program khusus pemerintah semata-mata hanya ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional". Dan dapat juga diketahui dengan Trilogi Pembangunan pada saat itu. Pembangunan perekonomian di Indonesia diwarnai dengan utang luar negeri yang cukup besar, sehingga pada masa itu terjadi krisis moneter. Faktor lain penyebab krisis moneter adalah pola pemerintahan yang sentralistik (I Wayan Badrika, 2006:163). Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi, jadi sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berkembang. Oleh sebab itu pada masa Reformasi berlaku kebijakan otonomi daerah, yang dimana tujuannya adalah agar pemerintah daerah bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, tanpa harus selalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Diketahui bahwa keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan itu antara lain tingkat GNP pada tahun 1997 mencapai US\$ 1200 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan inflasi di bawah 3%, (I Wayan Badrika, 2006:158). Namun keberhasilan itu tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan, sehingga menimbulkan budaya KKN. Hal tersebut mengakibatkan situasi politik dan kondisi ekonomi semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis dan menyatakan pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan disinilah tugas selanjutnya bagi Orde Reformasi untuk menjadikan pemeritahan yang bersih dari KKN dan lebih ditegakkannya hukum,

sehingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah KPK yang tujuannya tidak lain adalah pemberantasan terhadap tindak korupsi, agar pembangunan pemerintahan menjadi lebih baik, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)”. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim harus melayani kehendak penguasa. Bahkan sering kali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga, kerabat atau para pejabat negara. Maka masalah supremasi hukum menjadi tuntutan rakyat dalam masa Reformasi. Jadi masalah hukum pada masa Reformasi saat ini diharapkan mampu mendundukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

Memang sangat luar biasa sekali praktik politik yang dilakukan oleh Soeharto. Bermula dari faktor ideologi Demokrasi Pancasila dan dengan dalil menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dari hal tersebut Soeharto melihat kelemahan-kemahan yang terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945.

Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan yang baru Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tuntutan dari reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Hasil amandemen tersebut antara lain memuat aturan tentang mekanisme pemilihan presiden, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan presiden.

Seburuk apapun kehidupan yang terjadi pada masa Orde Baru, masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013, kebanyakan memilih kehidupan di masa Orde Baru dibandingkan dengan masa Reformasi saat ini, terutama pada aspek ekonomi dan hankam.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan interaksi itu manusia sering melakukan persepsi, adapun pengertian persepsi secara umum adalah “pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek. Proses pencarian informasi untuk dipahami, alat-alat untuk memperoleh informasi melalui penginderaan, penglihatan, peraba dan seterusnya)

dan alat untuk memahami adalah kesadaran”, Linda L. Davidoff dalam Mari Juniati (1988:232).

Irwanto (1996:71) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”.

“Persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya”, Moskowitz dan Orgel dalam Bimo Walgito (2004:88).

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Harold J. Leavitt dalam Muslichah Zarkasi (1992:107) “persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu”.

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito (2004:89) Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka akan mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu bersifat individual.

Pengertian masyarakat diungkapkan oleh Robert Mac Iver dalam Budiyanto (2004:95) bahwa “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib/teratur (*society means a system of orderer relations*)”. Diantara hubungan-hubungan yang dilakukan antarmanusia terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik.

Sedangkan Koentjaraningrat dalam Budiyanto (2004:101) mengungkapkan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Harold J. Laski dalam Budiyanto (2004:101) “masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Dengan kata lain masyarakat dapat dikatakan mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah”.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Budiyanto (2004:101), sejak dilahirkan manusia memiliki dua keinginan pokok, yaitu :

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (yaitu masyarakat)
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Di dalam masyarakat, orang melakukan interaksi dengan orang lain, menjalankan aktivitas dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan karena manusia hidup

dalam suatu lingkungan tertentu, maka ada hasrat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut agar manusia tersebut bisa menjadi bagian dari masyarakat dan lingkungannya.

Pendapat lain mengenai masyarakat juga diungkapkan oleh Paul B. Horton & C. Hunt dalam Setiawan Dimas (2012:1), menurut mereka “masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut”.

Selain itu pendapat mengenai pengertian/definisi tentang masyarakat dikemukakan oleh J.L. Gilin dan J.P. Gilin. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Admin (2012:1) “Masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama”.

Adam Smith dikenal sebagai filsuf berkebangsaan Skotlandia. Ia juga di bangsa-bangsa Barat disebut sebagai Bapak Ekonomi. Teori ekonominya, *Laissez Faire*, merupakan teori ekonomi pasar bebas yang banyak mempengaruhi pada abad ke-18. Menurut Adam Smith dalam Andika Prasetya (2012:1) “ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara”.

Pendapat lain mengenai ekonomi juga dipaparkan oleh Abraham Maslow dalam Andika Prasetya (2012:1), menurutnya “ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien”.

Dalam bukunya bertajuk *Foundations Of Economic Analysis*, Paul A. Samuelson dalam Andika Prasetya (2012:1) mengemukakan bahwa “ekonomi adalah sebagai cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan golongannya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”.

Selain itu, definisi mengenai ekonomi juga diungkapkan oleh M. Manulang dalam Andika Prasetya (2012:1), menurutnya “ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi pemenuhan barang maupun jasa”.

“Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”, dalam Rahasia Hidup (2010:1). Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional

merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan di beberapa negara (misalnya Jepang) disebut Angkatan Bela Diri.

Jenis pertahanan:

1. Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer,
2. Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter

“Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan”, dalam Rahasia Hidup (2010:1). Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.

Masa Orde Baru menurut I Wayan Badrika (2006:123) pada hakikatnya bahwa Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lampau. Di samping itu juga berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Ada pula yang berpendapat bahwa “Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia” (Ardhika Mulasari, 2012:1). Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada Era Pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dalam jangka waktu tersebut perkembangan ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun pada saat itu terjadi persamaan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

“Kata reformasi berasal dari kata Inggris *reform* yang artinya perbaikan atau pembaharuan”, (Windi, 2011:1). Hakikatnya, reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan dengan memelihara (*to change while preserving*). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Masa Era Reformasi menurut I Wayan Badrika (2006:166) pada hakikatnya “Reformasi merupakan perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju arah perbaikan”. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terutama dalam perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.



Adapun pengertian Reformasi menurut Manggala (2011:1) menyebutkan bahwa “Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama menuju tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru”.

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013.

### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena mengkaji kondisi aktual tentang persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 berjumlah 211 orang. Sampel diambil 10% diambil dari jumlah kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, dokumentasi, dan teknik wawancara. Uji reliabilitas menggunakan *Product Moment* kemudian dilanjutkan menggunakan rumus *Sperman Brown*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Penyajian Data Mengenai Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Ekonomi Pada Pemerintahan Orde Baru**

**Tabel 4.10** Distribusi Frekuensi Dari Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Ekonomi Pada Pemerintahan Orde Baru

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Positif	25 – 28	12	57,14%
2	Sedang	21 – 24	6	28,58%
3	Negatif	17 – 20	3	14,28%
Jumlah			21	100%

Sumber: *Analisis Data Primer*

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Orde Baru di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menunjukkan 12 responden (57,14%) masuk dalam kategori positif, sebanyak 6 responden (28,58%) masuk dalam kategori sedang, 3 responden (14,28%) tergolong dalam kategori negatif. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Orde Baru di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menyatakan kategori positif.

## 2. Penyajian Data Mengenai Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Ekonomi Pada Pemerintahan Reformasi

**Tabel 4.13** Distribusi Frekuensi Dari Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Ekonomi Pada Pemerintahan Reformasi

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Positif	24 – 28	4	19,05%
2	Sedang	19 – 23	13	61,90%
3	Negatif	14 – 18	4	19,05%
Jumlah			21	100%

Sumber: *Analisis Data Primer*

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menunjukkan 4 responden (19,05%) masuk dalam kategori positif, sebanyak 13 responden (61,90%) masuk dalam kategori sedang, 4 responden (19,05%) tergolong dalam kategori negatif. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menyatakan kategori sedang.

## 3. Penyajian Data Mengenai Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Hankam Pada Pemerintahan Orde Baru

**Tabel 4.16** Distribusi Frekuensi Dari Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Hankam Pada Pemerintahan Orde Baru

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Positif	5 – 6	15	71,43%
2	Sedang	3 – 4	4	19,05%
3	Negatif	1 – 2	2	9,52%
Jumlah			21	100%

Sumber: *Analisis Data Primer*

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Orde Baru di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menunjukkan 15 responden (71,43%) masuk dalam kategori positif, sebanyak 4 responden (19,05%) masuk dalam kategori sedang, 2 responden (9,52%) tergolong dalam kategori negatif. Berdasarkan hasil

perhitungan ini maka persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Orde Baru di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menyatakan kategori positif.

#### 4. Penyajian Data Mengenai Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Hankam Pada Pemerintahan Reformasi

**Tabel 4.19** Distribusi Frekuensi Dari Indikator Persepsi Masyarakat Tentang Aspek Hankam Pada Pemerintahan Reformasi

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Positif	5 – 6	3	14,29%
2	Sedang	3 – 4	11	52,38%
3	Negatif	1 – 2	7	33,33%
Jumlah			21	100%

Sumber: *Analisis Data Primer*

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menunjukkan 3 responden (14,29%) masuk dalam kategori positif, sebanyak 11 responden (52,38%) masuk dalam kategori sedang, 7 responden (33,33%) tergolong dalam kategori negatif. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 menyatakan kategori sedang.

## B. Pembahasan

1. Persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi untuk indikator persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Orde Baru dari 21 responden terdapat 12 responden (57,14%) termasuk dalam kategori positif, 6 responden (28,58%) termasuk dalam kategori sedang dan 3 responden (14,28%) merupakan kategori negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 memiliki persepsi positif atau mendukung terhadap kebijakan perekonomian yang terjadi pada masa Orde Baru, maksudnya masyarakat desa umumnya merasakan kemakmuran pada masa itu. Pembangunan jalan, listrik masuk desa, pembangunan gedung sekolah dan kesehatan, perluasan lahan pertanian dan pembangunan bendungan juga irigasi, benar-benar masyarakat Desa Tias Bangun rasakan saat Orde Baru.
2. Persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi untuk indikator persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Reformasi dari 21 responden terdapat 4 responden (19,05%) termasuk dalam kategori positif,

13 responden (61,90%) termasuk dalam kategori sedang dan 4 responden (19,05%) merupakan kategori negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 memiliki persepsi sedang terhadap kebijakan perekonomian yang terjadi di masa Reformasi. Maksudnya masyarakat menilai kebijakan perekonomian masa Reformasi sebenarnya sudah baik, namun hanya ada sedikit kesalahan pada para oknumnya, sehingga masyarakat di Dusun IV Desa Tias Bangun hanya menganggap perekonomian saat ini hanya sedang-sedang saja, terlebih mengeluh pada kondisi jalan raya saat ini, jalan rusak dimanamana dan jalan merupakan sarana untuk memperlancar mobilitas perekonomian.

3. Persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi untuk indikator persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Orde Baru dari 21 responden terdapat 15 responden (71,43%) termasuk dalam kategori positif, 4 responden (19,05%) termasuk dalam kategori sedang dan 2 responden (9,52%) merupakan kategori negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 memiliki persepsi positif atau mendukung terhadap hankam yang terjadi pada masa Orde Baru, masyarakat desa umumnya merasakan keamanan yang terjamin pada masa itu. Masyarakat merasa aman dalam bepergian, walau ada begal namun tidak separah seperti saat masa Reformasi sekarang ini. Pelaku tindak kriminal takut dengan adanya penembak misterius yang cenderung vonis di tempat.
4. Persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi untuk indikator persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Reformasi dari 21 responden terdapat 3 responden (14,29%) termasuk dalam kategori positif, 11 responden (52,38%) termasuk dalam kategori sedang dan 7 responden (33,33%) merupakan kategori negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 memiliki persepsi sedang terhadap hankam yang terjadi pada masa Reformasi, masyarakat desa umumnya menilai kurang setuju dengan konsep HAM yang justru menjadi senjata para tindak kriminal, karena dianggap hukum tidak tegas dan kejahatan meraja lela seperti maling, garong dan begal di daerah sekitar Desa Tias Bangun.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan mengenai persepsi masyarakat tentang perubahan aspek ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013, maka peneliti dapat menyimpulkan:

Masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013 memiliki pandangan positif terhadap kehidupan dibidang ekonomi dan hankam yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Maksudnya masyarakat desa umumnya merasakan kemakmuran/sejahtera pada masa itu (masa Soeharto). Hal ini dapat dilihat pula dengan adanya pembangunan jalan, listrik masuk desa, pembangunan gedung sekolah dan kesehatan, perluasan lahan pertanian, pembangunan bendungan dan irigasi serta keamanan yang terjamin benar-benar masyarakat di Dusun IV Desa Tias Bangun rasakan saat Orde Baru. Sehingga dari indikator persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Orde Baru termasuk dalam kategori Positif, dari 21 responden terdapat 12 responden atau 57,14% berpendapat demikian; dari indikator persepsi masyarakat tentang aspek ekonomi pada pemerintahan Reformasi termasuk dalam kategori sedang, dari 21 responden terdapat 13 responden atau 61,90% berpendapat demikian; dari indikator persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Orde Baru termasuk dalam kategori positif, dari 21 responden terdapat 15 responden atau 71,43% berpendapat demikian; dan dari indikator persepsi masyarakat tentang aspek hankam pada pemerintahan Reformasi termasuk dalam kategori sedang, dari 21 responden terdapat 11 responden atau 52,38% berpendapat demikian.

### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

#### **1. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Bagi kepala desa dan perangkat desa di Desa Tias Bangun agar selalu menjadi pengayom masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa hendaknya harus bisa menampung dan sedikit memberikan jalan keluar terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Terlebih untuk saat ini masalah keamanan yang semenjak masa Orde Baru berakhir, tindak kriminalitas seperti begal menjadi meraja lela. Karena dengan keadaan keamanan yang terjamin maka keadaan perekonomian akan segera mengikutinya.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat di Desa Tias Bangun agar dapat bekerja sama dengan perangkat pemerintah desa dan mendukung semua kebijakan dari pemerintah. Terlebih himbauan untuk masyarakat di Desa Tias Bangun untuk selalu memiliki etos kerja yang tinggi agar dapat memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarganya masing-masing. Dengan keadaan ekonomia yang baik maka tindak kriminalitas seperti pencurian sedikit terminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2012. *Pengertian Masyarakat*. <http://wawan-junaidi.blogspot.com> (Diunduh tanggal 30 Desember 2012)
- Angraini, Lia Tri. 2012. *sejarah orde baru*. <http://ncjfs.blogspot.com> (diunduh tanggal 19 Januari 2013)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 411 Hal.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah Untuk SMA Jilid 3 Kelas XII Progran Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga. 282 hal.
- Bewok, Malik. 2011. *Pertahanan & Keamanan Rakyat Semesta*. [malikbewok.wordpress.com](http://malikbewok.wordpress.com) (diunduh tanggal 5 Maret 2013)
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas I Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 182 hal.
- Dimas, Setiawan. 2012. *Definisi Masyarakat*. <http://definisimu.blogspot.com> (diunduh tanggal 30 Desember 2012)
- Ghopur, Abdul. 2012. *Komitmen Terhadap Pancasila*. <http://sosbud.kompasiana.com> (diunduh tanggal 13 Januari 2013)
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metode Reseach II*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM. 425 hal.
- IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor. 2011. *Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan SBY-Boediono dalam Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan*. <http://www.imparsial.org>. (Diunduh tanggal 7 April 2013)
- Irawanto. 1996. *Psikologi umum*. Jakatra: Gramedia Pustaka Umum.
- Juniarti, Mari. 1988. *Psokologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Manggala. 2011. *Reformasi Di Indonesia*. <http://tatamuhtadin.blogspot.com> (diunduh tanggal 20 Januari 2013)

- Marham, Dimaz. 2009. *Faktor-Faktor/Unsur-Unsur Masyarakat*. <http://dimazmarham.blogspot.com> (diunduh tanggal 30 Desember 2012)
- Mulasari, Ardhika. 2012. *ORDE BARU*. <http://goobservationhistory.blogspot.com> (diunduh tanggal 19 Januari 2013)
- Munir. 2010. *Faktor-faktor Persepsi*. <http://psi.wordpress.com> (diunduh tanggal 03 Januari 2013)
- Muradi. 2007. *Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia*. <http://muradi.wordpress.com> (diunduh tanggal 13 Januari 2013)
- Pamungkas, Sri-Bintang. 2001. *Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga. 382 hal.
- Pangesti, Gustiani Utnia. 2012. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia*. <http://gustianipangesti.blogspot.com> (diunduh tanggal 13 Januari 2013)
- Prasetya, Andika. 2012. *Pengertian dan Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli*. <http://andikaprasetya11.blogspot.com> (diunduh tanggal 5 April 2013)
- Rahasia Hidup. 2010. *Pertahanan dan keamanan negara*. <http://pertahanandankeamanannegara.blogspot.com> (diunduh tanggal 26 Maret 2013)
- UUD 1945, P-4, GBHN, Tap–Tap MPR 1993, Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran Dan Bahan Referensi Penataran
- Soerjono, Soekamto. 1990. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara. 340 hal.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 456 Hal.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2010. *Agama khonghucu*. <http://id.wikipedia.org> (diunduh tanggal 5 Maret 2013)
- Windi. 2011. *Reformasi*. <http://windiloviyo.blogspot.com> (diunduh tanggal 20 Januari 2013)
- Yudiana, Chandra. 2011. *Sistem pemerintahan Indonesia*. <http://41707011.blog.unikom.ac.id> (diunduh tanggal 27 Desember 2012)
- Zarkasi, Muslichah. 1992. *Psikologi Manajemen*. Jakarta: Erlangga